



DOKUMEN RANCANGAN AKHIR

PERUBAHAN RENCANA KERJA

(RENJA)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMPANG**

TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka Pembangunan Daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks Pembangunan Manusia. Dalam perencanaan Pembangunan Daerah, proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan Wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkatan SKPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dinamakan Rencana Kerja (RENJA) SKPD. Ini menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam RENSTRA SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Perencanaan Pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam Menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Penyusunan Renja mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja DPMPSTSP tahun 2023 merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi

pembangunan dan akan menjadi bagian dari Renstra DPMPTSP tahun 2023 ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan RAPBD yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 24. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011–2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
 27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3).
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 1);
32. Peraturan Bupati Sampang Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023.
33. Peraturan Bupati Sampang Nomor 123 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang.
34. Peraturan Bupati Sampang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit – unit Organisasi di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja ini adalah :

1. Tersedianya instrument yang dapat digunakan oleh pimpinan Organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan Organisasi;
2. Tersedianya instrument awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak – pihak dalam rangka menilai kinerja Organisasi;
3. Tersedianya instrument yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

4. Sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran – sasaran strategis dalam visi dan misi kabupaten Sampang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER I TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2023 Perangkat Daerah
- 3.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER I
TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu siklus perencanaan pembangunan perangkat daerah yang diawali dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil.

Evaluasi Renja Tahun 2023 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2023 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 . Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung Realisasi capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun Berjalan (Tahun 2023 semester I). Bila dari hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian maka diperlukan adanya perubahan Renja tahun 2023 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Evaluasi Perubahan Renja Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu sampai dengan Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran RPJMD 2019-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran berjalan. Dalam Renja Dinas Penanamann Modal dan Pelayaanan Terpadu Satu Kabupaten Sampang tahun 2023 memuat 6 program dan 13 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan.

Adapun rekapitulasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang sampai dengan Semester I sebagai berikut:

Tabel 2.1.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang**

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023 Semester I)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
						Target Renja PD Ta. 2022	Realisasi Renja PD Ta. 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
	TUJUAN :										
	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Kenaikan realisasi Investasi	%	3,6	-16,99	0,16	10,71	66,94	3,40	-2,88	-0,8
	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyaeakat	Nilai	83,51	162,73	82,47	-	-	82,99	-	-
	SASARAN :										
	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai realisasi Investasi	Juta Rp.	352.837,980	719.698,894	303.257,158	329.378,337	1,09	340.577,200	1.049.417.788,201	0,29
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	93,75	186,17	93,35	93,24	0,99	93,50	372,91	3,98
2.18	URUSAN PENANAMAN MODAL										
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di fasilitasi	%	100	196,19	-	-	-	-	196,19	196,19
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	surat	13950	3700	-	-	-	-	3700	0,27
		Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	rekening	4	8	-	-	-	-	8	2

Bab II Hasil Evaluasi Renja
Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023 Semester I)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
						Target Renja PD Ta. 2022	Realisasi Renja PD Ta. 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh jasa perizinan	unit	11	22	-	-	-	-	22	2
		Jumlah tenaga kebersihan	OB	4	8	-	-	-	-	8	2
		Jumlah Bahan Bacaan Yang Disediakan	Exp	144	51	-	-	-	-	51	0,35
		Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman	Orang	84	85	-	-	-	-	85	1,012
		Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung administrasi teknis	Ob	1	2	-	-	-	-	2	2
2.12.2.12.0 1.01.02.	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah ATK	jenis	286	91	-	-	-	-	91	0,32
		Jumlah barang cetakan	Jenis	56	20	-	-	-	-	20	0,36
		Jumlah barang penggandaan	Jenis	64	22	-	-	-	-	22	0,34
		Jumlah Komponen instalasi listrik	jenis	123	37	-	-	-	-	37	0,30
		Jumlah Alat Kebersihan Yang Disediakan	Jenis	192	51	-	-	-	-	51	0,27
2.12.2.12.0 1.01.03.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Koordinasi Dalam Daerah	liter kali	9340 590	1706 53	- -	- -	- -	- -	1706 53	0,18 0,089
		Jumlah Koordinasi Luar Daerah	kali	300	97	-	-	-	-	97	0,32
2.12.01.2.1 2.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	100	200	-	-	-	-	200	2

Bab II Hasil Evaluasi Renja
Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023 Semester I)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
						Target Renja PD Ta. 2022	Realisasi Renja PD Ta. 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
2.12.01.2.1 2.01.02.01	Pembangunan/ Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Unit	1	1	-	-	-	-	1	1
		Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	2	2	-	-	-	-	2	1
2.12.01.2.1 2.01.02.02	Pengadaan/ Pemeliharaan Kendaraan Dinas Opearsional	Jumlah Kendaraan dinas R4 yang diadakan	Unit	2	0	-	-	-	-	0	0
		Jumlah Kendaraan dinas R2 yang diadakan	Unit	12	0	-	-	-	-	0	0
		Jumlah Kendaraan dinas R4 yang dipelihara	Unit	6	8	-	-	-	-	8	1,33
2.12.01.2.1 2.01.02.03	Pengadaan/ Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan Kantor	Unit	86	20	-	-	-	-	20	0,23
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara	unit	10	6	-	-	-	-	6	0,6
		Jumlah pengadaan peralatan Kantor	Unit	47	15	-	-	-	-	15	0,32
		Jumlah Spanduk/ Umbul-umbul/ Bendera Yang Disediakan	Unit	8	40	-	-	-	-	40	5
2.12.2.12.0 1.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur	%	100	200	-	-	-	-	200	2
2.12.2.12.0 1.05.01.	Pelaksanaan Bimtek/ Sosialisasi/ Seminar	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/ Sosialisasi/ Seminar	Ok	72	11	-	-	-	-	11	0,15
2.12.2.12.0 1.06.	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang	%	100	183,33	-	-	-	-	183,33	1,83

Bab II Hasil Evaluasi Renja
Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023 Semester I)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023		
					Target Renja PD Ta. 2022	Realisasi Renja PD Ta. 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)	
		baik dan tepat waktu									
2.10.01.2.1 2.01.04.01	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/ Non Fisik, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJiP	Dok	6	11	-	-	-	-	11	1,83
2.10.01.2.1 2.01.04.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA	Dok	4	9	-	-	-	-	9	2,25
2.10.01.2.1 2.01.04.03	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen SKM	Dok	1	2	-	-	-	-	2	2
		Jumlah Promosi Pelayanan Publik Perangkat Daerah		1	1	-	-	-	-	1	1
2.12.2.12.0 1.15.	Program Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor	Investor	912	3363	-	-	-	-	3363	3,69
2.12.2.12.0 1.15.02	Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal	Rapat-rapat Perencanaan Penanaman Modal Daerah dan RKPPMD	Kali	24	8	-	-	-	-	8	0,33
2.12.2.12.0 1.15.03	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Profil/ Prospektus Investasi dan Regulasi Kebijakan Penanaman Modal	propektus	6	2	-	-	-	-	2	0,33
			peraturan PM	6	1	-	-	-	-	1	0,17
			FGD	2	1	-	-	-	-	1	0,5
			peta peluang investasi	1	1	-	-	-	-	1	1

Bab II Hasil Evaluasi Renja
Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023 Semester I)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
						Target Renja PD Ta. 2022	Realisasi Renja PD Ta. 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
2.12.2.12.0 1.15.04	Promosi Penanaman Modal	Jumlah Minat Investor dan Jumlah Pameran yang akan diikuti	Matcmaking / Gathering , pameran	8	1	-	-	-	-	1	0,13
				8	2	-	-	-	-	2	0,25
2.12.2.12.0 1.16.	Program Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai investasi PMDN	(juta rupiah)	967.865,730	1.171.452,507.480	-	-	-	-	1.171.452.507.480	0,12
2.12.2.12.0 1.16.01	Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pemantauan/ Pengawasan	pelaku usaha	440	40	-	-	-	-	40	0,09
		Jumlah fasilitasi permasalahan pelaksanaan penanaman modal	pelaku usaha	200	70	-	-	-	-	70	0,35
		Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan	kali	14	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0 1.16.02	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah sosialisasi dan Fasilitasi Permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal	pelaku usaha	200	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0 1.16.03	Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Pengembangan Aplikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal	paket aplikasi	11	3	-	-	-	-	3	0,27
		Jumlah pengolahan data penanaman modal	laporan	48	0	-	-	-	-	0	0
2.12.2.12.0 1.17.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	%	100	144	-	-	-	-	144	1,44
2.12.2.12.0 1.17.01	Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor I	Jumlah Pemohon Izin yang telah diterbitkan di sektor I	izin	50	84	-	-	-	-	84	1,60

Bab II Hasil Evaluasi Renja
Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023 Semester I)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
						Target Renja PD Ta. 2022	Realisasi Renja PD Ta. 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
2.12.2.12.0 1.17.02	Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor II	Jumlah Pemohon Izin yang telah diterbitkan di sektor II	izin	70	44	-	-	-	-	44	0,57
2.12.2.12.0 1.17.03	Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor III	Jumlah Pemohon Izin yang telah diterbitkan di sektor III	izin	50	65	-	-	-	-	65	1,08
2.12.2.12.0 1.18.	Program Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	%	100	130	-	-	-	-	130	1,30
2.12.2.12.0 1.18.01	Fasilitasi Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah pengaduan	pengaduan	100	13	-	-	-	-	13	0,13
2.12.2.12.0 1.18.02	Fasilitasi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	Peningkatan SDM	orang	344	70	-	-	-	-	70	0,203
		Jumlah regulasi Perbub baru dan sosialisasi tentang pelayanan perizinan dan non perizinan		2	2	-	-	-	-	2	1
2.12.2.12.0 1.18.03	Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Jumlah Laporan	pelaporan	12	12	-	-	-	-	12	1
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang di fasilitasi	%	-	-	100	100	1	100	200	-
2.18.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	-	-	100	100	1	100	200	-

Bab II Hasil Evaluasi Renja
Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023 Semester I)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
						Target Renja PD Ta. 2022	Realisasi Renja PD Ta. 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
2.18.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra, Renja, Sop)	Dok	-	-	3	3	1	3	6	-
2.18.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA – SKPD	Dok	-	-	1	1	1	1	2	-
2.18.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA – SKPD	Dok	-	-	1	1	1	1	2	-
2.18.01.2.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA – SKPD	Dok	-	-	1	1	1	1	1	-
2.18.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA – SKPD	Dok	-	-	1	1	1	1	1	-
2.18.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah (LPPD, LKPJ, SPIP, SAKIP, RB)	Dok	-	-	5	5	1	5	5	-
2.18.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	%	-	-	100	100	1	100		-
2.18.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai ASN	orang	-	-	50	50	1	35	85	-
		Jumlah kontrak daerah yang dibayar gajinya	Ob	-	-	1	1	1	2	3	-
2.18.01.2.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah alat tulis kantor	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dok	-	-	1	1	1	1	2	-

Bab II Hasil Evaluasi Renja
Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023 Semester I)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
						Target Renja PD Ta. 2022	Realisasi Renja PD Ta. 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
2.18.01.2.0 7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan bulanan / triwulanan/ semesteran SKPD	Dok	-	-	3	3	3	3	6	-
2.18.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan barang milik daerah	%	-	-	100	100	1	100	200	-
2.18.01.2.0 3.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD	Dok	-	-	1	1	1	1	2	-
		Jumlah dokumen RKPBMMD	Dok	-	-	1	1	1	1	2	-
2.18.01.2.0 3.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen semesteran barang milik daerah	Dok	-	-	4	4	1	4	8	-
2.18.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio Pegawai yang mengikuti bintek dan jumlah ASN	%	-	-	100	100	1	100	200	-
2.18.01.2.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsinya	Ok	-	-	6	6	1	7	13	-
2.18.01.2.0 5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bintek implementasi perundang - undangan	Ok	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	%	-	-	100	100	1	100	200	-
2.18.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	Jenis/paket	-	-	15	15	1	2	17	-

*Bab II Hasil Evaluasi Renja
Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan*

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023 Semester I)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
						Target Renja PD Ta. 2022	Realisasi Renja PD Ta. 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
2.18.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor	Jenis / paket	-	-	56	56	1	1	57	-
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Unit / paket	-	-	8	8	1	1	9	-
		Jumlah spanduk / umbul - umbul / bendera yang diadakan	Jenis / paket	-	-	3	3	1	1	4	-
2.18.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Jenis / paket	-	-	56	56	1	1	57	-
2.18.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Jenis / paket	-	-	6	6	1	1	7	-
		Jumlah belanja pengadaan yang disediakan	Jenis / paket	-	-	1	1	1	1	2	-
2.18.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Exp	-	-	2	2	1	2	4	-
2.18.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman tamu	Ob / laporan	-	-	200	200	1	1	201	-
2.18.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah pemenuhan makanan dan minuman rapat	Ob / laporan	-	-	50	50	1	1	51	-
		Jumlah kebutuhan BBM	Liter / laporan	-	-	1445	1402	0,97	1	1403	-
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	kali / laporan	-	-	27	27	1	1	28	-
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kali / laporan	-	-	25	25	1	1	26	-

*Bab II Hasil Evaluasi Renja
Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan*

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023 Semester I)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
						Target Renja PD Ta. 2022	Realisasi Renja PD Ta. 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik daerah	%	-	-	100	100	1	100	200	-
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan lemari arsip	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pengadaan filling cabinet	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pengadaan running text	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pengadaan kursi lipat	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pengadaan kursi sofa	Set	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pengadaan AC	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pengadaan play ground anak	set	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pengadaan tandon air atas	unit	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pengadaan meja rapat	unit	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pengadaan kursi rapat	unit	-	-	57	57	1	-	-	-
		Jumlah Pengadaan komputer / laptop	unit	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pengadaan printer	unit	-	-	-	-	-	-	-	-

*Bab II Hasil Evaluasi Renja
Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan*

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023 Semester I)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
						Target Renja PD Ta. 2022	Realisasi Renja PD Ta. 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
		Mesin Antrian Oline Puskesmas	unit	-	-	1	1	1	-	-	-
		Ac Floor Standing	unit	-	-	1	1	1	-	-	-
		Tandon Air Atas / Stainless	unit	-	-	1	1	1	-	-	-
		Neon Box Standing	unit	-	-	-	-	-	1	1	-
		Kursi Sofa	unit	-	-	-	-	-	1	1	-
2.18.01.2.0 7.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun / di rehab	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pagar kantor yang dibangun	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	-	-	100	100	1	100	100	-
2.18.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Surat / laporan	-	-	2250	2250	1	1	2251	-
2.18.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air dan komunikasi	Bulan / laporan	-	-	12	12	1	1	13	-
2.18.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, tenaga administrasi dan tenaga	Ob / laporan	-	-	25	25	1	1	26	-

*Bab II Hasil Evaluasi Renja
Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan*

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023 Semester I)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
						Target Renja PD Ta. 2022	Realisasi Renja PD Ta. 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
		waker									
2.18.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	%	-	-	100	100	1	100	100	-
2.18.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	unit	-	-	6	6	1	11	17	-
		Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	unit	-	-	13	13	1	11	24	-
2.18.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	-	-	62	62	1	70	132	-
2.18.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	-	-	2	2	1	2	4	-
2.18.01.2.1 3	Penataan Organisasi	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan	%	-	-	100	100	1	100	200	-
2.18.01.2.1 3.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM	Dok / laporan	-	-	1	1	1	1	2	-

*Bab II Hasil Evaluasi Renja
Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan*

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023 Semester I)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
						Target Renja PD Ta. 2022	Realisasi Renja PD Ta. 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
		Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	Kali / laporan	-	-	1	1	1	1	2	-
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah potensi Investasi	jenis	-	-	2	2	1	4	6	-
2.18.02.2.0 2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peluang investasi	jenis	-	-	2	2	1	3	5	-
2.18.02.2.0 2.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah propektus kabupaten	propektus	-	-	1	1	1	1	2	-
		Rapat -rapat perencanaan penanaman modal dan RKPPMD	Kali	-	-	2	2	1	0	2	-
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor (PMDN / PMA)	investor	5000	3363	2700	4981	1,844	4990	13334	2,67
2.18.03.2.0 1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor	investor	5000	3363	2700	4981	1,844	4990	13334	2,67
2.18.03.2.0 1.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman	Jumlah minat Investor / Matchmaking	Matchmaking/dokume	-	-	1	1	1	4	5	-

Bab II Hasil Evaluasi Renja
Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023 Semester I)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
						Target Renja PD Ta. 2022	Realisasi Renja PD Ta. 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
	Modal Daerah Kabupaten/Kota		n								
		Jumlah Pameran Investasi yang di ikuti	Kali / dokumen	-	-	2	2	1	4	6	-
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	%	100	144	100	100	1	100	344	3,44
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	%	100	130	100	0	0	100	230	2,3
2.18.04.2.0	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	%	100	144	100	100	1	-	244	2,44
1		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti	%	100	130	100	0	0	-	130	1,3
		Evaluasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	dokumen			2	2	1	2	4	-
2.18.04.2.0	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Jumlah Izin dan non izin yang diterbitkan di sektor I	izin	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01		Jumlah Izin dan non izin yang diterbitkan di	izin	-	-	-	-	-	-	-	-

*Bab II Hasil Evaluasi Renja
Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan*

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023 Semester I)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
						Target Renja PD Ta. 2022	Realisasi Renja PD Ta. 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
	secara Elektronik	sektor II									
		Jumlah Izin dan non izin yang diterbitkan di sektor III	izin	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Izin OSS	izin	-	-	4200	6224	1,48	-	6224	-
		Jumlah Izin Non OSS	izin	-	-	2300	2376	1,03	-	2376	-
		Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Pelaku usaha	-	-	-	-	-	1500	1500	-
2.18.04.2.0 1.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah laporan tindak lanjut yang ditangani	Laporan	-	-	10	0	0	-	-	-
		Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan Perizinan dan Non Perizinan	dokumen	-	-	3	0	0	-	-	-
		Jumlah Laporan SP, Maklumat Pelayanan,	kali	-	-	5	5	1	-	-	-

*Bab II Hasil Evaluasi Renja
Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan*

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023 Semester I)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
						Target Renja PD Ta. 2022	Realisasi Renja PD Ta. 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
		Inovasi Pelayanan									
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah LKPM Pertahun	Pelaku Usaha	-	-	180	162	0,9	185	347	-
2.18.05.2.0 1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKPM Pertahun	Pelaku Usaha	-	-	180	162	0,9	185	347	-
2.18.05.2.0 1.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pemantauan	pelaku usaha	-	-	70	0	0	-	-	-
2.18.05.2.0 1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah fasilitasi permasalahan pelaksanaan penanaman modal	pelaku usaha	-	-	40	40	1	450	490	-
		Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan	kali	-	-	1	6	6	-	-	-
2.18.05.2.0 1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pengawasan	pelaku usaha/ kegiatan usaha	-	-	70	82	1,17	85	167	-

*Bab II Hasil Evaluasi Renja
Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan*

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023 Semester I)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
						Target Renja PD Ta. 2022	Realisasi Renja PD Ta. 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DARA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi PMDN	Juta Rp.	1.332.773,091	1.171.452,507	745.128,403	1.327.773,090	0,18	1.328.773,091	3.827.998,688	2,87
2.18.06.2.0 1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Investasi PMDN	Juta Rp.	1.332.773,091	1.171.452,507	745.128,403	1.327.773,090	0,18	1.328.773,091	3.827.998,688	2,87
2.18.05.2.0 1.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pengembangan sistem informasi penanaman modal	paket aplikasi	-	-	1	1	1	-	-	-
		Jumlah pengolahan data penanaman modal	laporan	-	-	121	121	1	-	-	-

Bab II Hasil Evaluasi Renja
Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023 Semester I)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
						Target Renja PD Ta. 2022	Realisasi Renja PD Ta. 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
		Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yg diolah, dikaji dan dimanfaatkan	dokumen	-	-	-	-	-	3	3	-

Sampang, Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
RELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. SAMPANG**



Ie. Maipd Stamroni, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670324 199710 1 001

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2023 Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati Kabupaten Sampang. Perwujudan Visi Pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan Batasan proses pencapaian tujuan. Misi Pembangunan Kabupaten Sampang yang terkait dengan urusan penanaman modal yaitu *misi ke - 2 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif dan misi ke -4 : Memperkuat tata Kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.*

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sampang tersebut telah ditetapkan perubahan tujuan dan sasaran urusan penanaman modal dan Tenaga Kerja seperti diuraikan pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang

Tujuan				Sasaran				Ket
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		2023	Perubahan			2023	Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Kenaikan Realisasi Investasi	0,24 %	3,40 %	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (Juta Rp.)	306.687,934 (Juta Rp.)	340.577,200 (Juta Rp.)	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	71,06 (Nilai)	73,01 (Nilai)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	93,50 (Nilai)	93,50 (Nilai)	

3.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang yaitu *Meningkatnya Investasi Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik* Kabupaten Sampang. Dalam mewujudkan masyarakat Sampang Hebat bermartabat, telah ditetapkan sasaran melalui *Meningkatnya realisasi Investasi Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan*, guna tercapainya target indikator tersebut dalam Perubahan Rencana Kerja pada target indikator tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang tahun 2023 sebagaimana telah terlampir pada tabel 3.2

Tabel 3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sampang

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA AWAL				PERUBAHAN RENJA TAHUN 2023				BERTAMBAH / BEERKURANG (Rp.)
		LOKASI	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 10-6
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				5.325.581.277	APBD			4.011.262.085	APBD	#####
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	DPMPTSP	100%	4.309.279.057	APBD	DPMPTSP	100%	3.128.386.577	APBD	#####
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	DPMPTSP	100%	11.000.006	APBD	DPMPTSP	100%	11.000.006	APBD	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	3 dokumen	4.244.857	APBD	DPMPTSP	3 dokumen	4.244.857	APBD	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMPTSP	1 dokumen	1.176.485	APBD	DPMPTSP	1 dokumen	1.176.485	APBD	-

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMPTSP	1 dokumen	1.038.985	APBD	DPMPTSP	1 dokumen	1.038.985	APBD	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPMPTSP	1 dokumen	1.356.610	APBD	DPMPTSP	1 dokumen	1.356.610	APBD	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DPMPTSP	1 dokumen	1.038.985	APBD	DPMPTSP	1 dokumen	1.038.985	APBD	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	5 dokumen	2.144.084	APBD	DPMPTSP	5 dokumen	2.144.084	APBD	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	DPMPTSP	100%	3.604.351.832	APBD	DPMPTSP	100%	2.542.126.314	APBD	#####
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	35 Orang	3.602.425.712	APBD	DPMPTSP	35 Orang	2.540.200.194	APBD	(1.062.225.518)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP	1 dokumen	999.140	APBD	DPMPTSP	1 dokumen	999.140	APBD	-

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPMPTSP	3 dokumen	926.980	APBD	DPMPTSP	3 dokumen	926.980	APBD	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio pegawai yang mengikuti bintek dan jumlah ASN OPD	DPMPTSP	100%	11.318.000	APBD	DPMPTSP	100%	1.710.000	APBD	(9.608.000)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP	7 Orang	11.318.000	APBD	DPMPTSP	1 Orang	1.710.000	APBD	(9.608.000)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	DPMPTSP	100%	163.649.406	APBD	DPMPTSP	100%	137.931.917	APBD	(25.717.489)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	2 Paket	9.997.834	APBD	DPMPTSP	2 Paket	3.711.486	APBD	(6.286.348)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	3 Paket	13.784.355	APBD	DPMPTSP	3 Paket	12.181.849	APBD	(1.602.506)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	1 Paket	16.999.217	APBD	DPMPTSP	1 Paket	12.883.107	APBD	(4.116.110)
Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	DPMPTSP	1 Paket	12.275.000	APBD	DPMPTSP	1 Paket	5.776.975	APBD	(6.498.025)

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	DPMPTSP	2 Dokumen	2.760.000	APBD	DPMPTSP	2 Dokumen	2.760.000	APBD	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	1 Laporan	7.840.000	APBD	DPMPTSP	1 Laporan	6.125.000	APBD	(1.715.000)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	1 Laporan	99.993.000	APBD	DPMPTSP	1 Laporan	94.493.500	APBD	(5.499.500)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik Daerah	DPMPTSP	100%	27.000.000	APBD	DPMPTSP	100%	-	APBD	(27.000.000)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DPMPTSP	8 unit	27.000.000	APBD	DPMPTSP	0 unit	-	APBD	(27.000.000)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	100%	394.840.875	APBD	DPMPTSP	100%	344.413.550	APBD	(50.427.325)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	1 Laporan	2.450.000	APBD	DPMPTSP	1 Laporan	1.650.000	APBD	(800.000)
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPMPTSP	1 Laporan	169.190.875	APBD	DPMPTSP	1 Laporan	140.563.550	APBD	(28.627.325)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	1 Laporan	223.200.000	APBD	DPMPTSP	1 Laporan	202.200.000	APBD	(21.000.000)

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	DPMPTSP	100%	123.627.948	APBD	DPMPTSP	100%	90.713.800	APBD	(32.914.148)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPMPTSP	11 Unit	52.941.400	APBD	DPMPTSP	11 Unit	54.613.800	APBD	1.672.400
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPMPTSP	70 Unit	20.000.000	APBD	DPMPTSP	70 Unit	18.100.000	APBD	(1.900.000)
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPMPTSP	2 Unit	50.686.548	APBD	DPMPTSP	2 Unit	18.000.000	APBD	(32.686.548)
Penataan Organisasi	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan	DPMPTSP	100%	490.990	APBD	DPMPTSP	100%	490.990	APBD	-
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	DPMPTSP	1 Laporan	490.990	APBD	DPMPTSP	1 Laporan	490.990	APBD	-
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Potensi Investasi	DPMPTSP	4 jenis	112.103.802	APBD	DPMPTSP	4 jenis	43.130.029	APBD	(68.973.773)
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Jumlah Potensi Investasi	DPMPTSP	4 Jenis	112.103.802	APBD	DPMPTSP	4 jenis	43.130.029	APBD	(68.973.773)
Penyediaan peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP	3 Dokumen	112.103.802	APBD	DPMPTSP	3 Dokumen	43.130.029	APBD	(68.973.773)
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	DPMPTSP	2900 investor	250.165.519	APBD	DPMPTSP	4990 investor	248.123.019	APBD	(2.042.500)

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	DPMPTSP	2900 investor	250.165.519	APBD	DPMPTSP	4990 investor	248.123.019	APBD	(2.042.500)
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	DPMPTSP	4 Dokumen	250.165.519	APBD	DPMPTSP	4 Dokumen	248.123.019	APBD	(2.042.500)
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Izin yang diterbitkan Tepat Waktu	DPMPTSP	100%	213.474.700	APBD	DPMPTSP	100%	170.110.261	APBD	(43.364.439)
	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti		100%		APBD		100%		APBD	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DPMPTSP	93,50	213.474.700	APBD	DPMPTSP	93,50	170.110.261	APBD	(43.364.439)
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPTSP	1500 Pelaku Usaha	213.474.700	APBD	DPMPTSP	1500 Pelaku Usaha	170.110.261	APBD	(43.364.439)
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Melapor di LKPM	DPMPTSP	185 pelaku usaha	354.700.000	DAK Non FISIK	DPMPTSP	185 pelaku usaha	354.700.000	APBD	-

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang melapor di LKPM	DPMPTSP	185 pelaku usaha	354.700.000	DAK Non FISIK	DPMPTSP	185 pelaku usaha	354.700.000	APBD	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	450 Pelaku Usaha	312.350.000	DAK Non FISIK	DPMPTSP	450 Pelaku Usaha	312.350.000	APBD	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	DPMPTSP	85 Kegiatan Usaha	42.350.000	DAK Non FISIK	DPMPTSP	85 Kegiatan Usaha	42.350.000	APBD	-
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PM	Nilai Investasi PMDN	DPMPTSP	849045211 (juta Rp.)	85.858.199	APBD	DPMPTSP	1.328.773,091 (juta Rp.)	66.812.199	APBD	(19.046.000)
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten / Kota	Nilai Investasi PMDN	DPMPTSP	849045211 (juta Rp.)	85.858.199	APBD	DPMPTSP	1.328.773,091 (juta Rp.)	66.812.199	APBD	(19.046.000)
Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	DPMPTSP	1 paket	85.858.199	APBD	DPMPTSP	1 paket	66.812.199	APBD	(19.046.000)
				5.325.581.277				4.011.262.085		-1.341.319.192

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang tahun 2019 – 2024 dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang Tahun 2023.

Pencapaian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang tahun 2023 agar dapat mempermudah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang dalam menentukan Target dan Realisasinya sampai kondisi akhir Renstra

Komitmen dan dukungan dari seluruh Sumber Daya Manusia di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang sangat diperlukan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan- kegiatan tersebut dan guna terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak. Harapan kami semoga Perubahan Rencana Kerja (P- Renja) Tahun 2023 ini dapat dipedomani dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan good governance untuk peningkatan Realisasi investasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Sampang.

Sampang, Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. SAMPANG**



Ir. Maud Syamroni, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19870324 199710 1 001

Tabel Program Kegiatan Berdasarkan APBD 2023 (DPPA Tahun 2023)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang

KODE REKENING	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2023 (DPPA PD Th. 2023)			
			LOKASI	TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4.011.262.085	APBD
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	DPMPTSP	100%	3.128.386.577	APBD
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	DPMPTSP	100%	11.000.006	APBD
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	3 dokumen	4.244.857	APBD
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMPTSP	1 dokumen	1.176.485	APBD
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	DPMPTSP	1 dokumen	1.038.985	APBD

2.18.01.2.01.0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPMPTSP	1 dokumen	1.356.610	APBD
2.18.01.2.01.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DPMPTSP	1 dokumen	1.038.985	APBD
2.18.01.2.01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	5 dokumen	2.144.084	APBD
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	DPMPTSP	100%	2.542.126.314	APBD
2.18.01.2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	35 Orang	2.540.200.194	APBD
2.18.01.2.02.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP	1 dokumen	999.140	APBD
2.18.01.2.02.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPMPTSP	3 dokumen	926.980	APBD

2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio pegawai yang mengikuti bintek dan jumlah ASN OPD	DPMPTSP	100%	1.710.000	APBD
2.18.01.2.05.1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP	1 Orang	1.710.000	APBD
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	DPMPTSP	100%	137.931.917	APBD
2.18.01.2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	2 Paket	3.711.486	APBD
2.18.01.2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	3 Paket	12.181.849	APBD
2.18.01.2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	1 Paket	12.883.107	APBD
2.18.01.2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DPMPTSP	1 Paket	5.776.975	APBD
2.18.01.2.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	DPMPTSP	2 Dokumen	2.760.000	APBD
2.18.01.2.06.0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	1 Laporan	6.125.000	APBD

2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	1 Laporan	94.493.500	APBD
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik Daerah	DPMPTS P	100%	-	APBD
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DPMPTSP	0 unit	-	APBD
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTS P	100%	344.413.550	APBD
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	1 Laporan	1.650.000	APBD
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPMPTSP	1 Laporan	140.563.550	APBD
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	1 Laporan	202.200.000	APBD
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	DPMPTS P	100%	90.713.800	APBD

2.18.01.2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPMPTSP	11 Unit	54.613.800	APBD
2.18.01.2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPMPTSP	70 Unit	18.100.000	APBD
2.18.01.2.09.0 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPMPTSP	2 Unit	18.000.000	APBD
2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan	DPMPTS P	100%	490.990	APBD
2.18.01.2.13.0 2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	DPMPTSP	1 Laporan	490.990	APBD
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Potensi Investasi	DPMPTS P	4 Jenis	43.130.029	APBD
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Jumlah Potensi Investasi	DPMPTS P	4 Jenis	43.130.029	APBD
2.18.02.2.02	Penyediaan peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP	3 Dokumen	43.130.029	APBD
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	DPMPTS P	4990 investor	248.123.019	APBD
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	DPMPTS P	4990 investor	248.123.019	APBD

2.18.03.2.01.0 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	DPMPTSP	4 Dokumen	248.123.019	APBD
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Izin yang diterbitkan Tepat Waktu	DPMPTS P	100%	170.110.261	APBD
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti		100%		APBD
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DPMPTS P	1500 Pelaku Usaha	170.110.261	APBD
2.18.04.2.01.0 1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPTSP	1500 Pelaku Usaha	170.110.261	APBD
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Melapor di LKPM	DPMPTS P	185 Pelaku Usaha	354.700.000	APBD

2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang melapor di LKPM	DPMPTS P	185 Pelaku Usaha	354.700.000	APBD
2.18.05.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	450 Pelaku Usaha	312.350.000	DAK Non Fisik
2.18.05.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	DPMPTSP	85 Kegiatan Usaha	42.350.000	DAK Non Fisik
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PM	Nilai Investasi PMDN	DPMPTS P	1.328.773,091 (juta Rp.)	66.812.199	APBD
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten / Kota	Nilai Investasi PMDN	DPMPTS P	1.328.773,091 (juta Rp.)	66.812.199	APBD
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	DPMPTSP	1 paket	66.812.199	APBD
					4.011.262.085	